

## **ILUSI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018**

**Agustin Fidiastuti**  
**Rudy Badrudin**

*E-mail:* rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

### **ABSTRACT**

This study aims to identify the phenomenon of fiscal illusion on the effect of Regional Taxes, Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) on Capital Expenditures and their effects on Economic Growth and Poverty in Regencies/Cities in Central Java Province in 2015 -2018. The type of data used is secondary data. The research object includes 35 regencies/cities in Central Java Province with data sources obtained from the Budget Realization and Economic Growth and Poverty data in 29 Regencies and 6 Cities in Central Java Province 2015-2018. The analytical method used is Partial Least Square analysis. The results showed that (1) Regional Taxes had a positive and significant effect on Capital Expenditures (2) Profit Sharing Funds (DBH) had positive and significant effects on Capital Expenditures (3) General Allocation Funds (DAU) had positive and significant effects on Capital Expenditures (4) Capital Expenditures have a positive but not significant effect on Economic Growth (5) Economic Growth has a positive and significant effect on Poverty (6) There is no fiscal illusion phenomenon on the effect of Regional Taxes, DBH, DAU on Capital Expenditures (7) Capital expenditures that do not occur illusions fiscal has a positive but not significant effect on economic growth and poverty in the Regency/City of Central Java Province in 2015-2018.

**Keywords:** regional taxes, revenue sharing funds, general allocation funds, capital expenditures, economic growth, poverty

**JEL classification:** H72, I32, R11

### **PENDAHULUAN**

Gejolak Sosial-Politik yang dialami Negara Indonesia pada tahun 1997, dan pada puncaknya permasalahan tersebut mampu meruntuhkan orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Berakhirnya orde baru memunculkan sebuah permasalahan yaitu sistem ketatanegaraan yang bersifat sentralisasi dianggap buruk. Dikarenakan menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang ada di daerah dibandingkan dengan di kota.

Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir menjadi UU No. 23 Tahun 2004. Diterbitkannya UU tersebut menjadi tanda berubahnya sistem ketatanegaraan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk mengatasi

berbagai permasalahan daerah salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap negara. Hal ini menjadi alasan terkadang suatu negara merasa kesulitan dalam menerapkan strategi pembangunannya (Rini *et al.*, 2016).

Upaya penurunan tingkat kemiskinan salah satunya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita dalam waktu berkelanjutan akan menuju pada kesejahteraan masyarakat sehingga mengarah kepada penurunan tingkat kemiskinan. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui alokasi belanja daerah. Pengalokasian belanja daerah yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah dapat didanai melalui Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan daerah. Namun, permasalahan muncul ketika penerimaan daerah tidak berdampak terhadap pengeluaran daerah. Saat kondisi seperti ini menurut Worthington & Dollery (1999) disebut dengan fenomena ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Secara logika besarnya penerimaan daerah harus sama dengan pengeluaran daerah.

Berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan data pertumbuhan penduduk tahun 2015-2018 Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan pertumbuhan penduduk tertinggi Se-Pulau Jawa setelah sebelumnya Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2015-2018 Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase penduduk miskin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi tetapi persentase penduduk miskin jauh lebih rendah.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang membahas antara *agent* dengan *principal* yang bekerja sama dalam satu kontrak. Masalah keagenan muncul ketika terdapat perbedaan tujuan antara *agent* dengan *principal* (Godfrey, 2009:362). Fokus utama dalam teori keagenan ini terdapat pada asimetris informasi.

Hal ini disebabkan karena hanya *agent* saja yang terlibat sebagai penyedia layanan serta yang mengetahui informasi secara keseluruhan. Menurut Bergman & Lane (1990), kerangka kerja hubungan *principal* dan *agent* merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, hubungan keagenan ditunjukkan pada Pemerintah Daerah yang berperan sebagai *agent* dan rakyat yang berperan sebagai *principal*.

### Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776), berpendapat mengenai proses pertumbuhan ekonomi yang dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, pertumbuhan total *output* yang terdiri dari SDA yang tersedia, sumber daya insani, serta persediaan barang modal yang ada. Aspek kedua adalah pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010:55-56).

Sollow-Swan (1957), berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor tersebut yaitu bertambahnya faktor demografi, tenaga kerja, jumlah modal dan tingkat peradaban teknologi. Teori pertumbuhan dan pembangunan ini sering disebut teori Neo-Klasik yang ditentukan oleh fungsi produksi yang didukung oleh Charles Cobb dan Paul Douglas. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Merupakan pengembangan atas dua teori yaitu teori yang dikemukakan oleh Roy F. Harrod pada tahun 1939 yang berpendapat dalam *Economic Journal* sedangkan Domar juga berpendapat dalam jurnal *American Economic Review* pada tahun 1947. Teori Harrod- Dommar berfokus pada analisis perekonomian yang mampu tumbuh dan berkembang pada jangka panjang (Sukirno, 2006:255).

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi oleh Nicholas Kaldor. Teori ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu masyarakat kelompok kapitalis dan masyarakat kelompok buruh (Djojohadikusumo, 1994:49-52). Selain membagi masyarakat menjadi dua kelompok, Nicholas Kaldor juga mengatakan jika dalam kelompok masyarakat dapat dibedakan dengan memandang daerah penduduk dan sektor pekerjaan yang dilakukan. Kelompok masyarakat tersebut yaitu penduduk perkotaan (jasa/industri) dan penduduk pedesaan (pertanian).

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah

daerah yang dinyatakan dalam satuan uang berkaitan dengan pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah. Rencana kerja ini dijalankan baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki masa kurun waktu satu tahun untuk mencapai sasaran pembangunan. Proses penyusunan APBD suatu daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Badrudin, 2017:98).

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom. Pajak daerah termasuk ke dalam faktor keuangan yang memberi dampak terhadap anggaran belanja suatu daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi pajak daerah ini dilakukan dengan memungut, mengelola, dan menetapkan tarif. Merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa dan tidak dikompensasikan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut demi menciptakan rakyat yang makmur, adil dan merata. Pajak Daerah ini dapat dipungut oleh Provinsi maupun kabupaten/kota yang sama-sama bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari alokasi dana APBN pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah sehingga termasuk faktor yang mempengaruhi belanja daerah (Badrudin, 2017:55-56). DBH ini bersumber dari pajak maupun non pajak. DBH yang berasal dari pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh pasal 21, PPh pasal 25, PPh pasal 29 WPODN. Sedangkan DBH yang berasal dari non pajak (SDA) meliputi: kehutanan, pertambangan, perikanan, peternakan. Angka persentase penerimaan DBH dipengaruhi oleh faktor potensi SDA yang dimiliki daerah bersangkutan. Daerah yang memiliki potensi SDA yang melimpah akan mendapatkan angka persentase penerimaan DBH yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki SDA yang sedikit.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pengalokasian APBN sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah (Siregar, 2017:83-84). Pengalokasian DAU ini bersifat *block grant* atau wewenang pengalokasian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya. Pengalokasian DAU oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memperhatikan faktor kebutuhan fiskal dan potensi fiskal daerah bersangkutan. Daerah dengan kebutuhan fiskal kecil tetapi potensi fiskal lebih besar akan menerima DAU yang relatif kecil. Sedangkan pada saat yang sama, daerah dengan kebutuhan fiskal besar namun potensi fiskal rendah akan menerima pengalokasian DAU yang relatif lebih besar. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai seluruh belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik.

### **Belanja Daerah**

Bersumber UU No. 33 Tahun 2004 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja Daerah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan melalui kas daerah pada periode tahun yang bersangkutan yang berdampak pada kekayaan pemerintah daerah yang berkurang. Belanja daerah ini dirinci sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah, organisasi atau kegiatan lain yang ada di daerah. Belanja daerah ini juga sebagai penentu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan (Chritina *et al.*, 2019). Merujuk Permendagri No. 59 tahun 2007 Pengalokasian belanja daerah meliputi: belanja langsung dan belanja tidak langsung

### **Teori Kemiskinan**

Kemiskinan memperlihatkan standar yang dihasilkan atas kondisi seseorang atau sekelompok orang dalam mempertahankan kehidupan yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya (Kuncoro, 2006:112-117). Hak dasar itu saling mengikat satu sama lain, salah satu hak dasar yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi pemenuhan hak yang lain. Dalam hal ini pertama adalah sandang, pangan, papan, kesehatan yang tidak mampu terpenuhi. Kedua, hak memperoleh pendidikan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, fasilitas sosial yang jauh dari kata layak. Ketiga, tatanan sosial yang tidak adil yang ikut melanggengkan kemiskinan.

### **Teori Ilusi Fiskal**

Ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia yaitu Amilcare Puvlani (1903) fenomena itu terjadi saat pembuatan keputusan dengan merencanakan laporan yang bertujuan untuk mendapatkan kontribusi yang besar dari masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi pemerintah pusat melalui dana perimbangan untuk mendapatkan dana melebihi dari yang dibutuhkan. Menurut Worthington & Dollery (1999), indikasi fenomena ilusi fiskal terjadi ketika penerimaan daerah tidak berdampak terhadap pengeluaran daerah. Hal itu disebabkan karena kelebihan dana yang diperoleh tersebut tidak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pengalokasian belanja daerah. Adanya ilusi fiskal ini akan berpengaruh bagi perekonomian suatu daerah. Ilusi fiskal akan menghambat proses peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di daerah tersebut.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah**

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah dilakukan oleh Arthur Simanjuntak (2019), Rubiyanto (2019) dan Abbas *et al.* (2020) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasar paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah**

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh DBH terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh Murniasih & Mulyadi (2011), Ernayani (2017), dan Mulyati & Yusriadi (2017), yang menemukan bahwa DBH secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasar paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah dilakukan oleh Pratami & Dwirandra (2017), Liando & Hermanto (2017) dan Arni & Suardana (2018), yang menemukan bahwa DAU secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasar paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Rubidno & Sasana (2015) Deviani (2016), Putri (2016), Deswanto *et al.* (2017) dan Chamdani (2019), tentang pengaruh Belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang menemukan bahwa belanja daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dilakukan oleh Wahyudi & Rejekingsih (2015), Rini *et al.* (2016) dan Romi & Umiyati (2018) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan yang menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Berdasar paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:** Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018

Penelitian ini menggunakan unit analisis pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2108. Metode Sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan meneliti keseluruhan yang ada di populasi untuk diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dengan karakteristik seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015- 2018. Jumlah data yang diteliti adalah 140 data (29 Kabupaten dan 6 Kota dalam kurun waktu 4 tahun).

**HASIL PENELITIAN**

**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif ini diolah dengan *Microsoft Excel 2013* dan mendapatkan hasil yang terdapat di tabel 1 sebagai berikut:

Berdasar Tabel 1, Variabel Pajak Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp1.331.817.746.450 diperoleh Kota Semarang tahun 2018 dan nilai minimum sebesar Rp25.974.837.133 diperoleh Kota Magelang tahun 2016 serta rata-rata sebesar Rp118.688.529.350 dan Standar Deviasi sebesar Rp185.107.209.999,62. Hal itu mengindikasikan bahwa pajak daerah rendah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2015-2018.

Variabel DBH memiliki nilai maksimum sebesar Rp246.044.588.085 dimiliki Kota Kudus tahun 2017 dan nilai minimum sebesar Rp18.772.034.465 dimiliki Kota Magelang tahun 2015 serta nilai rata-rata sebesar Rp48.634.281.507 dan standar deviasi sebesar Rp40.227.607.099,20. Hal itu mengindikasikan bahwa Dana Bagi Hasil rendah pada Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah dalam kurun waktu 2015-2018.

Variabel DAU memiliki nilai maksimum sebesar Rp2.276.872.960.000 dimiliki Kota Pemalang tahun 2017 dan nilai minimum sebesar Rp400.176.755.000 dimiliki Kota Salatiga 2017 dan rata-rata sebesar Rp959.475.166.606 dan standar deviasi sebesar Rp289.973.843.932,83. Hal itu mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum rendah pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2015-2018. Variabel Belanja Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp4.506.407.629.744 dimiliki Kota Semarang tahun 2018 dan nilai minimum sebesar Rp673.865.039.498 dimiliki Kota Salatiga tahun 2015 serta nilai rata-rata sebesar Rp2.021.533.171.110 dan standar deviasi Rp644.090.858.163,22. Hal itu mengindikasikan bahwa Belanja Daerah tinggi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2015-2018.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai maksimum sebesar Rp 23,54% di Kabupaten Blora dan nilai minimum sebesar 2,54% pada Kabupaten Kudus tahun 2016 serta nilai rata-rata sebesar 5,54% dan standar deviasi sebesar 1,66%. Hal itu mengindikasikan mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi rendah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2015-2018.

Variabel Kemiskinan memiliki nilai maksimum sebesar 21,45% dimiliki Kabupaten Wonosobo tahun 2016 dan nilai minimum sebesar sebesar 4,14% dimiliki Kota Semarang tahun 2018 serta nilai rata-rata sebesar 12,29% dan standar deviasi sebesar 4,09%. Hal itu mengindikasikan bahwa tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018 tergolong mendekati rata-rata.

**Tabel 1**  
**Analisis Deskriptif**

	N	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
PD (Rp)	140	1.331.817.746.450	25.974.837.133	118.688.529.350	185.107.209.999,62
DBH (Rp)	140	246.044.588.085	18.772.034.465	48.634.281.507	40.227.607.099,20
DAU (Rp)	140	2.276.872.960.000	400.176.755.000	959.475.166.606	289.973.843.932,83
BD (Rp)	140	4.506.407.629.744	673.865.039.498	2.021.533.171.110	644.090.858.163,22
PE (%)	140	23,54	2,54	5,54	1,66
KEM (%)	140	21,45	4,14	12,29	4,09

Sumber: Data diolah, 2021

**Analisis Induktif**  
**Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**

**Tabel 2**  
**Nilai R- Square**

	R-square	Keterangan
Belanja Daerah	0,791	79,1% Variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, sedangkan 20,9% dijelaskan oleh faktor lain.
Pertumbuhan Ekonomi	0,002	0,2% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah, sedangkan 99,8% dijelaskan oleh faktor lain.
Kemiskinan	0,001	0,1% variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, Sedangkan 99,9% dijelaskan faktor lain.

**Tabel 3**  
**Path Coefficients**

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T-Statistic	P Value	Prediksi	Temuan	Keputusan
P.Daerah → BD	0,415	0,391	0,092	4,525	0,000	+	+	Diterima*)
DBH → BD	0,118	0,118	0,028	4,255	0,000	+	+	Diterima*)
DAU → BD	0,673	0,685	0,082	8,224	0,000	+	+	Diterima*)
BD → PE	0,039	0,056	0,082	0,480	0,316	+	+	Ditolak
PE → KEM	0,031	0,034	0,059	0,538	0,296	-	+	Ditolak

Keterangan:

\*) T- Statistic > 1,96 dan p value < 0,05

Berdasar Tabel 3, Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan dengan *T-Statistic* 4,525 > 1,96 dan *P value* 0,000 < 0,05. Nilai *original sample* 0,415 menyatakan bahwa arah hubungan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah adalah positif. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan dengan *T-Statistic* 4,255 > 1,96 dan *P value* 0,000 < 0,05. Nilai *original sample* 0,118 menyatakan bahwa arah hubungan DBH terhadap Belanja Daerah adalah positif. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan dengan *T-Statistic* 8,224 > 1,96 dan *P value* 0,000 < 0,05. Nilai *original sample* 0,673 menyatakan bahwa arah hubungan DAU terhadap Belanja Daerah adalah positif.

Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dibuktikan dengan *T-Statistic* 0,480 < 1,96 dan *P value* 0,316 > 0,05. Nilai *original sample* 0,039 menyatakan bahwa arah hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan

Ekonomi adalah positif. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemiskinan yang dibuktikan dengan *T-Statistic* 0,538 < 1,96 dan *P value* 0,296 > 0,05. Nilai *original sample* 0,031 menyatakan bahwa arah hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan adalah positif.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah**  
 Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 1(H1) yang diajukan peneliti dapat diterima. Artinya, penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan dapat memberi pengaruh positif terhadap belanja daerah. Sehingga, meningkatnya pendapatan pajak daerah akan berdampak pada peningkatan belanja daerah yang akan dicapai oleh daerah tersebut.

Penjelasan atas pengaruh positif dan signifikan tersebut, dikarenakan pajak daerah termasuk sumber

penerimaan daerah yang berdasar pada kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah (UU Nomor 23 tahun 2014). Oleh karena itu, pengalokasian belanja daerah juga memperhatikan perolehan pendapatan pajak daerah pada setiap daerah. Ketergantungan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah secara mandiri dapat berkurang melalui peningkatan pajak daerah. Selain itu, program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkaitan dengan monitoring *online* penerimaan pajak pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran penarikan pajak yang dapat dikatakan berhasil. Contohnya, melalui program aplikasi "Sakpole" diluncurkan Juli 2017 yang dimiliki Jawa Tengah dalam mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor juga dinilai berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak provinsi guna membiayai kebutuhan daerah (Detik News, 2018).

Argumen tersebut didukung dengan bukti yaitu Kabupaten Grobogan tahun 2018 yang mampu memperoleh pajak daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor sebesar Rp122,5 Miliar yang melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp119,3 Miliar setelah diluncurkan penggunaan aplikasi "Sakpole". Pernyataan tersebut selaras dengan perolehan PAD Jawa Tengah tahun 2018 sebesar Rp12,9 Triliun yang melampaui target dari yang ditetapkan sebesar Rp12,2 Triliun. Dari angka tersebut 40% berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor (Nazzala, 2018)

Implementasi nyata sebagai bukti pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah adalah pada tahun 2018 Kota Semarang memiliki penerimaan pajak daerah tertinggi Se-Kabupaten/kota di Jawa Tengah dan pada tahun yang sama (2018) sebagai daerah dengan pengalokasian belanja daerah tertinggi Se-Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan perolehan PAD Semarang sebesar Rp4,23 Triliun. Dari perolehan tersebut 73% didominasi oleh perolehan pajak daerah. Peningkatan pendapatan pajak daerah tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah guna dapat dilakukan pemanfaatan yang berkelanjutan.

#### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 2 (H2) yang

diajukan oleh peneliti dapat diterima. Artinya, penerimaan Dana Bagi Hasil dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sehingga, meningkatnya penerimaan Dana Bagi Hasil akan berdampak pada peningkatan belanja daerah yang akan dicapai oleh daerah tersebut. Penjelasan pengaruh positif dan signifikan tersebut dapat disebabkan karena pengalokasian DBH. Pengalokasian DBH kepada daerah disesuaikan dengan potensi daerah yang dimiliki berdasarkan angka persentase tertentu atas daerah penghasil. DBH menjadi salah satu modal dasar berupa dana transfer yang digunakan untuk mendapatkan dana pembangunan selain DAU dan DAK. Atas dasar tersebut semakin banyak pemerintah daerah menerima DBH maka dapat berdampak pada peningkatan pengeluaran belanja daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana disetiap daerah.

Pemerintah daerah melalui DBH dituntut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan secara bertanggung jawab guna menjadi modal dalam melakukan pembangunan. Salah satunya melalui pengalokasian belanja modal. Selain itu, pengalokasian DBH yang besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada suatu periode yang tidak berdampak terhadap pengalokasian DBH pada periode berikutnya. Hal itu yang menjadi alasan DBH secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Temuan dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ernayani (2017), Murniasih & Mulyadi (2011) dan Mulyati & Yusriadi (2017). Pada penelitian tersebut memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3 (H3) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Artinya, penerimaan Dana Alokasi Umum dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, meningkatnya penerimaan Dana Alokasi Umum akan berdampak

pada peningkatan belanja daerah yang akan dicapai oleh daerah tersebut.

Penjelasan pengaruh positif dan signifikan tersebut dapat disebabkan karena sisi kepercayaan. Sisi Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari pengalokasian DAU yang diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*block grant*). Kepercayaan yang besar tersebut mengindikasikan jika DAU menjadi sebuah dana yang kendali penggunaannya benar-benar di tangan pemerintah daerah. Pada umumnya penggunaan DAU didasarkan pada prioritas dan kebutuhan daerah yang bertujuan untuk memberikan dampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya dana DAU ini diharapkan mengurangi kesenjangan keuangan antardaerah dan menciptakan stabilitas ekonomi di setiap daerah.

Pengalokasian DAU memperhatikan faktor celah fiskal yang diukur dengan kebutuhan fiskal yang dikurangi dengan kapasitas fiskal. Menjadikan DAU sebagai dana yang dominan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini yang menjadi alasan pengalokasian DAU secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Implementasi nyata pengalokasian DAU berdampak pada belanja daerah dibuktikan Kota Salatiga tahun 2015 memiliki pengalokasian DAU terendah Se-Kabupaten/kota di Jawa Tengah dan pada tahun yang sama (2015) sebagai daerah dengan tingkat pengalokasian belanja daerah terendah Se-Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Temuan dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Pratami & Dwirandra (2017), Liando & Hermanto (2017) dan Arni & Suardana (2018). Pada penelitian tersebut memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

**Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan pada uji hasil hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 (H4) yang diajukan peneliti ditolak. Peneliti memprediksi bahwa Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan akan berpengaruh positif pada Pertumbuhan ekonomi. Namun, temuan yang

diperoleh dari penelitian ini justru menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu Belanja Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan hasil yang didapat oleh Kisra (2014), Taher & Tuasela (2019) serta Paseki *et al.* (2014). Namun, tidak mendukung penelitian Rubidno & Sasana (2015), Deviani (2016), dan Putri & Cahyono (2016) yang memperoleh hasil penelitian bahwa secara signifikan belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjelasan atas pengaruh positif tidak signifikan tersebut, dapat terjadi karena kurangnya pengalokasian yang diberikan kepada belanja daerah yang bersifat produktif serta pengalokasian yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Contohnya, pengalokasian untuk pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada investasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur itu dapat berupa fasilitas transportasi (jalan, pelabuhan, dll), irigasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta fasilitas lain yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan permintaan barang dan jasa (Badrudin, 2017:21). Dampak lain dari pembangunan infrastruktur adalah dapat memberi *multiplier effect* bagi perekonomian daerah yaitu dalam mendukung peningkatan *output* produksi yang dihasilkan dari investasi produktif berupa peningkatan modal fisik oleh sektor swasta (Todaro & Smith, 2015:149) yang akan menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor yang berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat (Deviani, 2016).

Selain itu, pengaruh pengalokasian belanja daerah yang hanya terfokus pada belanja langsung terutama belanja pegawai yang berkaitan dengan pemberian upah dan honorarium pegawai. Tujuan dari belanja pegawai untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga namun, apabila hanya terfokus pada itu saja tanpa diikuti dengan peningkatan di sektor perekonomian justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurang efisiennya pengalokasian belanja barang dan jasa tidak sesuai (tinggi) dengan program atau kegiatan yang direncanakan juga menjadi alasan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan pada uji hasil hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 (H5) yang diajukan peneliti ditolak. Peneliti memprediksi

bahwa Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara signifikan akan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Namun, temuan yang diperoleh dari penelitian ini justru menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemiskinan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan yang diperoleh Nurmainah (2013). Namun, tidak mendukung penelitian Romi & Umiyati (2018) dan Wahyudi & Rejekingsih (2015) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Penjelasan logis berkaitan dengan pengaruh positif tidak signifikan tersebut dapat saja terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih bersifat eksklusif. Artinya, dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi belum merata dan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, akhirnya tidak berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi eksklusif diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan dan pemberian layanan dasar masyarakat oleh pemerintah daerah yang belum merata dan belum tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya permasalahan gizi buruk yang terjadi pada Februari 2018 di Kabupaten Brebes. Permasalahan tersebut disebabkan karena kemiskinan yang berdampak pada ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan kurangnya perhatian terhadap sumber energi yang dikonsumsi. Pendidikan juga mempengaruhi kasus gizi buruk karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pola hidup sehat serta pentingnya gizi untuk balita dan ibu. Selain itu, pemahaman masyarakat berkaitan dengan hak memperoleh fasilitas kesehatan yang dinilai masih rendah karena masyarakat beranggapan jika biaya kesehatan itu mahal juga menjadi penyebab kasus gizi buruk itu terjadi (Detik News, 2018)

Selain itu, pembangunan dan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat serta distribusi pendapatan yang belum merata kemungkinan menjadi penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu berdampak guna menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan pada masyarakat harusnya berpengaruh terhadap kualitas kesejahteraan manusia (BPS, 2008:4). Namun, apabila meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong

pendapatan masyarakat miskin, maka pendapatan yang diperoleh beberapa masyarakat masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok/dasar. Kebutuhan dasar tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembelian berbagai bahan sembako. Seperti yang telah dijelaskan (Kuncoro, 2006:112-117), bahwa salah satu indikator masyarakat dikatakan miskin yaitu apabila mereka masih merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, Jawa Tengah merupakan provinsi yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah kabupaten yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kota mengakibatkan ketersediaan fasilitas pada mayoritas kabupaten lebih rendah dibandingkan dengan kota. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum cukup untuk mendukung penurunan angka kemiskinan yang ada. Dikarenakan daerah yang termasuk dalam Kabupaten lebih terfokus dalam alokasi belanja modal untuk menambah ketersediaan fasilitas dan kurang dalam meningkatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

#### **Analisis Fenomena Ilusi Fiskal**

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ada tidaknya fenomena ilusi fiskal pada pengujian pengaruh pajak daerah, DBH, DAU terhadap belanja daerah. Analisis ilusi fiskal yang berfokus pada kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2015-2018. Terjadinya ilusi fiskal ketika penerimaan daerah tidak berdampak terhadap pengeluaran daerah. Dengan syarat adanya ilusi fiskal saat *P-value* variabel pajak daerah, DBH, DAU lebih besar daripada nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai *T-Statistic* yang lebih kecil dari 1,96.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian diperoleh *P value* pajak daerah, DBH, DAU memiliki *P value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 dan ketiga variabel memiliki nilai *T-Statistic* yang lebih besar dari 1,96. Selain itu, nilai *original sample* bertanda positif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel Pajak Daerah, DBH, DAU secara signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah serta memiliki arah hubungan yang positif. Oleh karena itu, pada keuangan daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2015-2018 tidak terjadi fenomena ilusi fiskal karena tidak dapat memenuhi syarat terjadinya

fenomena ilusi fiskal. Hal ini mengindikasikan jika penerimaan daerah berpengaruh terhadap pengeluaran daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2015-2018.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Calvin & Yuliana (2016) dan Nurhayati (2017). Pada penelitian tersebut mereka menemukan jika tidak terjadi fenomena ilusi fiskal pada masing-masing daerah yang diteliti. Hal ini mengindikasikan jika penerimaan daerah berpengaruh terhadap pengeluaran daerah

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Beberapa simpulan yang didapat dengan merujuk pada hasil analisis serta pembahasan adalah 1) pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018; 2) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018; 3) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018; 4) Belanja daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018; 5) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. 6) Pada penelitian ini menemukan hasil bahwa penerimaan daerah (Pajak Daerah, DBH, DAU) berdampak terhadap pengeluaran daerah dan *P value* lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai *T-Statistic* lebih besar dari 1,96. Maka, hal itu mengindikasikan bahwa tidak terjadi fenomena ilusi fiskal pada keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 dikarenakan tidak memenuhi syarat terjadinya fenomena ilusi fiskal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfer (DAU) dalam mengalokasikan belanja daerah guna mendanai kebutuhan daerah. Sehingga diperlukan pengoptimalan potensi pendapatan daerah guna meningkatkan penerimaan daerah demi mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

### Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka saran adalah 1) Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan belanjanya dalam rangka pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar harus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Tidak adanya fenomena ilusi fiskal pada keuangan daerah seharusnya pemerintah daerah dapat lebih memaksimalkan penerimaan daerah melalui pembuatan berbagai kebijakan berkaitan dengan pengalokasian ke belanja daerah untuk menjadi peluang dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang merata menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah bersangkutan. Pemerintah daerah juga harus bersinergi dengan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan melalui peningkatan keterampilan dan keahlian. Tujuannya agar masyarakat mampu membuka peluang usaha sendiri yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator lain dalam menilai fenomena ilusi fiskal pada keuangan daerah agar lebih komprehensif yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dikarenakan PDRB per kapita suatu daerah berbanding lurus dengan potensi sumber penerimaan suatu daerah yang berdampak pada alokasi belanja daerah yang besar pula. Dengan harapan alokasi belanja daerah yang besar mampu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan angka kemiskinan yang menurun. Selain itu, dapat menambahkan indikator lain dalam menilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Jawa Tengah akan menarik minat swasta untuk berinvestasi. Dengan adanya investasi swasta maka akan mampu menyerap tenaga kerja serta mampu meningkatkan *output* produksi yang akibatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. 2020. Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Akuntansi*, 6(2), 154–168.
- Alif Nazzala, R. 2018. *Jateng Targetkan PAD 2018 capai Rp12,9 Triliun*. Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180220/78/740795/jateng-targetkan-pad-2018-capai-rp129-triliun>
- Arni Asari, N. M., & Suardana, K. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 877. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>
- Arthur Simanjuntak. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(1), 45–52.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (Kedua). UPP STIM YKPN.
- Bergman, M., & Lane, J. E. 1990. Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- BPS. 2008. *Analisis Penghitungan dan Tingkat Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik.
- Calvin, C. Y., & Yuliana, L. 2016. Deteksi Ilusi Fiskal Pada Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(3), 152–159.
- Deviani. 2016. Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Edisi Pert). Pustaka LP3ES.
- Ernayani, R. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Godfrey, J. M. 2009. *Accounting Theory* (7th ed.). John Wiley & Sons Australia ,Ltd.
- Kisra, J. 2014. Pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten nagan raya. *Ekonomi*.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomika pembangunan* (keempat). UPP STIM YKPN.
- Liando, I. I., & Hermanto, S. B. 2017. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22), 1–22.
- Minggu, T. D., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. 2019. Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpekd.12793.18.2.2016>
- Mulyati, S., & Yusriadi. 2017. Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 211–220. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. 2011. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 56–71. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.291>
- Nurhayati, N. 2017. Analisis Deteksi Fiscal illusion dengan Pendekatan Revenue Enhancement Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/

- Kota di Wilayah III Cirebon). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i2.1425>
- Nurmainah, S. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>
- Paseki, M. G., Naukoko, A., & Wauran, P. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 30–42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5460>
- Pratami Indah, P., & Dwirandra, B. 2017. Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Lpds, Dan Pdrb Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal. *E-Jurnal Akuntansi*, 18.2(0), 1141–1170.
- Putri, S., & Cahyono, H. 2016. Pengaruh Belanja Daerah Dan Pmdn Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–7. <https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p>
- Rini, A. S., Sugiharti, L., & Airlangga, U. 2016. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 17–33. <https://media.neliti.com/media/publications/98850-ID-sinergi-industri-dan-umkm-berbasis-kelem.pdf>
- Romi, S., & Umiyati, E. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7. <file:///C:/Users/Sahabat Sg/Downloads/4439-Article Text-9760-1-10-20180401.pdf>
- Rubidno, & Sasana, H. 2015. Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks- Karesidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Ekonomi Dan Bisnis*, 215–226.
- Rubiyanto. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 92–107. [http://jurnal.unipas-by.ac.id/index.php/majalah\\_ekonomi/article/view/1906](http://jurnal.unipas-by.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1906)
- Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIE YKPN.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Prenada Media Group.
- Suripto, I. 2018. Detik News Jateng. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3853074/jumlah-penderita-gizi-buruk-tertinggi-di-jawa-tengah-ada-di-brebes>
- Taher, S., & Tuasela, A. 2019. Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 3(2), 40–58.
- Todaro, M. ., & Smith, S. . 2015 *Economic Development* (P. Education (ed.); 12th ed.).
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. 2015. Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1–15.
- Worthington, A. C., & Dollery, B. E. 1999. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is the flypaper effect? *Public Choice*, 99(1–2), 1–13. <https://doi.org/10.1023/a:1018329802757>